

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH DAN GUS DUR:
KONSEP NEGARA DAN KEPEMIMPINAN**

Matroni,¹ Masykur Arif.,² Sidqi Junaidi,³ Hasan Basri,⁴

Abstract:

The Khilafah theory is no longer able to fulfill the goals of government in Islam. Ibn Taimiyah finally promised an Islamic political theory which was expected to be able to cover the shortcomings and limitations of the Khilafah theory by referring to the classical Caliphate theory. Ibn Taimiyah's political theory is contained in one of his works entitled al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iah (Shari'ah-based Politics for the Improvement of Returners and Shepherds). Departing from the classical basis of the theory of caliphate, he not only criticized the theory of caliphate, but at the same time saw that there was no need for a caliphate. Even Ibn Taimiyah argues that in the Qur'an and as-Sunnah do not formulate a caliphate. The existence of the historical background of the Khilafah Khilafah al-Rasyidin is nothing more than an accident, not an example of political life. Even the life of the Prophet is not seen as the basis of government that needs to be adopted in a particular political system of government, he is nothing but a sui generis institution, not the basis of Islamic politics. Ibn Taimiyah's rejection of the practice of history as the basis of political philosophy, then Ibn Taimiyah avoided the error of assessing the existing political power as power legalized by the shadow of the caliph, as contained in the characteristics of the political theory of previous thought.

Keywords: Ibnu Taimiyah, Politics, Leadership

¹. Dosen STKIP PGRI Sumenep

². Dosen INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep

³. Mahasiswa panca sarjana IAIN Pemekasan

⁴. Dosen STKIP PGRI Sumenep

Abstrak:

Teori khilafah sudah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam Islam. Ibn Taimiyah akhirnya menjanjikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup kekurangan dan keterbatasan pada teori khilafah dengan merujuk pada teori kekhalifahan klasik. Teori politik Ibnu Taimiyah tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iah* (Politik yang Berdasarkan Syari'ah bagi Perbaikan Pengembali dan Gembala). Berangkat dari dasar teori kekhalifahan klasik, ia tidak saja mengkritisi teori kekhalifahan, namun dalam waktu yang sama memandang bahwa kekhalifahan tidak perlu ada. Bahkan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak merumuskan kekhalifahan. Adanya latar belakang sejarah khilafah khulafa al-Rasyidin tidak lebih dari sekedar aksiden, bukan merupakan contoh kehidupan politik. Bahkan kehidupan Nabi sekalipun tidak dipandang sebagai dasar pemerintahan yang perlu diadopsi dalam sistem politik pemerintahan tertentu, ia tidak lain hanyalah sebagai sebuah lembaga *sui generis*, bukan sebagai dasar politik Islam. penolakan Ibn Taimiyah terhadap praktek sejarah sebagai dasar filsafat politik, maka Ibn Taimiyah terhindar dari kesalahan menilai kekuatan politik yang ada sebagai kekuasaan yang dilegalisasikan oleh bayangan khalifah, sebagaimana terdapat pada ciri-ciri teori politik pemikiran sebelumnya.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, Politik, Kepemimpinan

A. PENDAHULUAN

Manusia dicipta membawa tugas mulia sebagai khalifah dan membawa persoalan pada masa awal sesudah masa Nabi Muhammad SAW yaitu persoalan politik. Semangat kebersamaan menjadikan tokoh politik kaum Anshor menerima diangkatnya Abu Bakar sebagai pemimpin Madinah setelah Nabi SAW. Paradigma tersebut menggambarkan bahwa berpolitik sebagai seni menyampaikan aspirasi. Inilah di antara prinsip yang dilakukan oleh Rasul selama menjadi pemimpin kaum muslimin Madinah. Meskipun banyak masalah yang terjadi pada masa-masa awal, hal tersebut terselesaikan dengan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, namun beberapa dekade kemudian masalah politik kembali muncul dalam kalangan umat Islam.⁵

Sejak masa Rasul, para khalifah, masa klasik, pertengahan sampai masa modern, kekayaan Islam telah mewariskan tradisi politik yang beragam. Seperti yang diketahui bersama bahwa masa periode klasik terdapat dua dinasti yang kuat yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Meskipun kekuasaan waktu itu ada di tangan umat Islam dan memiliki pengaruh sangat luas. Sementara Bani Umayyah memfokuskan kajian kebijakan perluasan dan pengembangan wilayah belum fokus terhadap kajian fikih politik *siyāsah*, namun ketika Bani Abbasiyyah berkuasa kajian *fiqh Siyāsah* mulai berkembang. Namun, pengaruh negara sangat kuat sehingga kajian para ulama Sunni dalam mengembangkan kajian fikih lebih cenderung merespon kekuasaan. Sedangkan Khawarij, Mu'tazilah dan Syi'ah jadi golongan di luar pemerintah walau pengaruhnya tidak kuat.

⁵ Abdul Mu'in, *Fiqh Siyāsah sebuah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), halaman. 1.

Khazanah tersebut menjadikan Harun Nassution membuat kesimpulan, pada masa klasik teori politik Sunni cenderung melegitimasi kekuasaan di tengah-tengah kepentingan golongan.⁶ Sifat transformatif-akomodatif menjadikan Sunni mampu menguasai politik dan pemikir-pemikir politik kaum Sunni yang bisa memberikan doktrin terhadap mereka dalam patron kekuasaan.

Al-Mawardi merupakan penggagas pertama tentang teori politik Islam, dan juga penulis pertama masalah politik dan kenegaraan dalam karangan dengan judul *al-Ahkām as-Sulṭāniah*.⁷ Di antara pemikiran Mawardi adalah tentang imāmah yang harus dilembagakan sebagai pengganti kenabian dalam upaya melindungi agama serta aturan kehidupan.⁸

Ada banyak tokoh pemikir muslim di era klasik, pertengahan, modern, sampai di era kontemporer sekarang ini. Dari era pertengahan tercatat para pemikir yang telah menuangkan ide dan gagasannya dari masa ke masa dalam memberikan sumbangsih pemikiran politik, adalah mulai dari Syihab al-Din Ahmad Ibn Rabi' yang hidup pada pemerintahan Abbasyiah abad ke 8 masehi, setelah itu menyusul al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasyiah, dan berikutnya muncul Ibn Khaldun yang hidup pada abad 17 masehi.

Menurut Munawir, pemikiran politik pada abad pertengahan memiliki setidaknya dua karakter umum. *Pertama*, teori mereka nampak jelas terpengaruh

⁶ M. Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), halaman. 22.

⁷ Qomarudin Kan, *Mawardi Theori of the State*, Terjemah Imran Rosidi, "*Telaah Kritis Teori Mawardi Tentang Negara*", (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000), halaman. 37.

⁸ M. Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada, 1990) halaman . 18.

oleh pemikiran filsafat politik Yunani terutama Plato, walaupun kualitas pengaruh tidak sama antara satu sama lain. *Kedua*, teori pemikiran mereka berlandaskan pada penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing, bahkan teori mereka bertitik tolak pada pemberian legitimasi sistem pemerintahan yang ada, atau pertahanan *status quo* kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.⁹

Apakah Ibn Taimiyah termasuk sebagaimana yang dicirikan oleh Munawir di atas? Bagaimana pandangan umum politik Ibn Taimiyah dalam tata negara dan teori kepemimpinan? Apa yang menjadikan karakteristik khusus yang membedakan pemikiran Ibn Taimiyah dengan para pemikir yang lain yang sejaman dengannya pada era abad pertengahan? Tema itu yang hendak kita diskusikan bersama dalam penelitian ini. Maka pada pembahasan artikel ini penulis hanya membatasi kajian pemikiran pada abad pertengahan dan hanya pada satu tokoh Ibn Taimiyah saja, dengan teori umum pemikiran politiknya.

B. PEMBAHASAN

Metodologi

Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan upaya menggambarkan dengan proporsional suatu penelitian kemudian dianalisa secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis atau kesejarahan, berarti obyek

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 42.

yang dikaji akan berusaha diletakkan dalam kerangka pikir dan penafsiran yang didukung latar belakang dan realitas yang melingkupi obyek tersebut.¹⁰

Menganalisa data menggunakan adalah deskriptif-analitik dan titik relevansi. Data dikaji dengan metode deskriptif-analitik dengan menggambarkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang filsafat Politik kemudian dianalisis untuk mengetahui konteks pemikirann Ibnu Taimiyah. Sedangkan metode titik relevansi dimaksudkan untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap semua konsep dan aspek menurut keselarasan antara yang satu dengan yang lain.¹¹

1. Pemikiran Politik Ibn Tamiyah

Sepintas tentang profil Ibn Tamiyah, ia lahir pada 22 Januari 1262 di Heran dekat Damaskus, dan meninggal di dalam penjara pada tanggal 26 September 1329 M pada usia ke 66 **tahun**.¹² Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Abu Abas Ahmad Ibn Abd al-Hakim Ibn Abd al-Salam Ibn Tamiyah. Pada umur 25 tahun ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan penceramah di masjid-masjid yang tidak jarang dalam penyampaianya cenderung dinilai kontroversial. Ia dikenal sebagai seorang pemikir dan tajam intuisinya, berfikir dan bersikap bebas, komitmen dalam kebenaran dan berani mempertahankannya idealismenya.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metadologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), cet. Ke-III, halaman. 102.

¹¹ Anton Beker, Haris Zuber, *Metodologi Penelitian Falsafat*, (yogyakarta: Kanisius, 1994), halaman. 63-64

¹² Ibnu Taimiyah sering keluar masuk penjara dikarenakan ketajaman kritiknya terhadap penguasa dan madzhab-madzhab yang ada pada saat itu dinilai banyak melakukan kesalahan menurut Ibnu Taimiyah.

Komitmentnya dalam kebenaran dan keberaniannya sudah tidak disangsikan lagi, dengan sejarah hidupnya yang pernah memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongolia dalam membela tanah air Syria. Ia juga tidak segan-segan memberikan kritik terhadap penguasa yang dinilai tidak sesuai dengan kebenaran, yang hal tersebut mengakibatkan ia sering keluar masuk tahanan jeruji besi. Lebih dari itu, ia memiliki banyak persyaratan yang menghantarkannya pada kepribadian yang luar biasa.¹³ Bahkan Golodziher memberikan penilaian khusus kepada Ibn Taimiyah memiliki kepribadian paling terkemuka pada abad ke VII H.¹⁴

Ia hidup pada masa dunia Islam penuh dengan disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral yang multi dimensi.¹⁵ Pada saat itu kekuasaan tidak lagi di tangan khalifah yang ada di Bagdad, akan tetapi berada di tangan penguasa lokal. Jatuhnya Bagdad ke tangan Tartar mengakhiri dinasti Abbasyiah dan ini merupakan klimaks proses disintegrasi.¹⁶ Maka dengan ini kerisauannya mulai muncul, hingga menurutnya teori khilafah sudah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam Islam. Ibn Taimiyah akhirnya menjanjikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup kekurangan dan keterbatasan pada teori khilafah dengan merujuk pada teori kekhalifahan klasik.¹⁷ Teori politik Ibnu Taimiyah tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Siyasah al-*

¹³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan*, (alih bahasa Masrohin), (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 21.

¹⁴ Ignaz Colodziher, *The Zahiris*, (alih bahasa Wolfgang), (Leiden: E. J. Brill, 1971), hlm. 113.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 80.

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, hlm. 82.

¹⁷ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1973), hlm. 106-107.

Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iah (Politik yang Berdasarkan Syari'ah bagi Perbaikan Pengembali dan Gembala).¹⁸

Berangkat dari dasar teori kekhalifahan klasik, ia tidak saja mengkritisi teori kekhalifahan, namun dalam waktu yang sama memandang bahwa kekhalifahan tidak perlu ada. Bahkan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak merumuskan kekhalifahan. Adanya latar belakang sejarah khilafah khulafa al-Rasyidin tidak lebih dari sekedar aksiden, bukan merupakan contoh kehidupan politik. Bahkan kehidupan Nabi sekalipun tidak dipandang sebagai dasar pemerintahan yang perlu diadopsi dalam sistem politik pemerintahan tertentu, ia tidak lain hanyalah sebagai sebuah lembaga *sui generis*, bukan sebagai dasar politik Islam.¹⁹ Dengan demikian, penolakan Ibn Taimiyah terhadap praktek sejarah sebagai dasar filsafat politik, maka Ibn Taimiyah terhindar dari kesalahan menilai kekuatan politik yang ada sebagai kekuasaan yang dilegalisasikan oleh bayangan khalifah, sebagaimana terdapat pada ciri-ciri teori politik pemikiran sebelumnya.

Ibn Taimiyah mengkritik teori pemikiran politik Syi'ah yang menurutnya tidak ada landasannya dalam Quran dan Sunah serta akal sehat. Ia beranggapan

¹⁸ Terdapat dua pembahasan utama dalam buku ini. *Pertama*, menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukan dan mengangkat para pejabat negara, pengelolaan kekayaan negara dan harta benda rakyat. *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan hak sesama manusia. Kemudian ditutup dengan pembahasan musyawarah dan pentingnya adanya pemerintahan. Dalam muqadimah buku tersebut, Ibnu Taimiyah menulis landasan teori politiknya pada Qur'an Surat al-Nisa' ayat 58 dan 59. Bahwa (1) untuk menciptakan kehidupan bernegara yang serasi hendaknya para pemimpin negara menyampaikan amanat pada kepada yang berhak terhadapnya dan bertindak adil atas sengketa yang terjadi di masyarakat. (2) Ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat merupakan rumusan dasar bernegara. Dengan demikian akan menciptakan keterpaduan antara kebijakan politik yang adil dan pemerintahan yang baik. Lihat Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iah*, (Cairo: Dar al-Sya'b, 1980).

¹⁹ *Ibid.*

bahwa teori politik Syi'ah *Imamah* adalah penyebab terjadinya perpecahan umat Islam.²⁰ Ibn Taimiyah juga mengomentari teori politik sunni tentang kekhalifahan yang mendukung legitimasi khalifah.²¹ Bahkan merakit kekhalifahan sedemikian rupa untuk menjawab berbagai kenyataan yang ada. Akibatnya, ada yang berani menilai ia mempunyai kecenderungan teori politik Khawarij.²²

Di sisi lain, Ibn Taimiyah menganggap sangat perlu akan adanya pemerintahan. Sebab tidak ada manusia yang bisa untuk meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia dan di akhirat tanpa tergabung dalam sebuah komunitas masyarakat yang mewujudkan kepentingan bersama, tolong-menolong dalam menghindarkan diri dari semua yang membahayakan. Manusia yang menurut Ibn Taimiyah sebagai makhluk sosial sekaligus berpolitik yang dibentuk secara natural, sudah seharusnya mampu untuk mengatur masyarakat dengan berbagai aturan, dan sedapat mungkin mematuhi pemimpin yang terpilih guna tercapai cita-cita bersama.²³

Kalau kita telisik lebih lanjut, dari pendapatnya Ibn Taimiyah, nampak bahwa pendapat Ibn Taimiyah semacam ini cenderung identik dengan pandangan Yunani klasik yang mengklasifikasikan evolusi negara dan pemerintahan ke

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-'Urbah, 1962), Vol. I, hlm. 38.

²¹ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah...*, *op.cit.*, hlm. 135-137. Menurut Ibnu Taimiyah tidak terdapat pemilihan pemimpin secara murni dikalangan umat Islam. Yang ada dukungan dan persetujuan umat Islam, berdasarkan aspek dhururiyat, bukan atas dasar ijmak, sebagai mana kaum Sunni, dan bukan bula atas dasar ketetapan Allah mengangkat seorang imam sebagaimana kaum Syiah.

²² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, hlm. 37.

²³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah*, (Riyad: Maktabah Riyad, 1963), jilid 20, hlm. 62.

dalam kecenderungan natural yang mendorong untuk bergabung dengan sesamanya guna menggapai cita bersama. Perbedaan terletak pada rasionalitas Ibn Taimiyah ditegaskan oleh keyakinan agamanya. Sebagaimana dia mengatakan bahwa asosiasi politik yang kosong dari agama akan terjebak dalam berbagai kepentingan yang salah, kendatipun dengan atau tanpa agama, asosiasi politik dapat saja tetap tegak dan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat universal dan permanen. Maka pemikitan Ibnu Taimiyah jelas merupakan realisasi dari dasar aspek dharuriyat dan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan.²⁴

2. Teori tentang Negara

Kata politik secara etimologi adalah berasal dari kata polis yang bermakna city state atau negara kota.²⁵ Pada zaman Yunani, interaksi sesama untuk menggapai kesejahteraan.²⁶ Politik Yunani dimaksudkan sebagai proses interaksi individu dengan berbagai hal untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan.

Menegaskan pendapat Ibn Taimiyah, bahwa menegakkan negara juga merupakan tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedati demikian, di dalam al-Quran maupun al-Hadist tidak menyinggung istilah negara, namun unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan di dalam ke dua sumber Islam tersebut, seperti keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, kehakiman, persoalan pembagian harta ghanimah dan penciptaan perdamaian merupakan instrumen politik bagi tegaknya negara.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah...*, *loc.cit.*

²⁵ Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*, (Malang: Setara press, 2009), halaman. 2

²⁶ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), halaman. 2

Beberapa tugas keagamaan seperti mengumpulkan zakat dan distribusinya, menghukum tindak kriminal tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak di topang dengan intervensi penguasaan politik. Maka Ibnu Taimiyah menempatkan politik dan negara pada dimensi fungsional, ia mengatakan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, dan tanpa adanya disiplin agama, negara pasti menjadi negara yang tiranik.²⁷

Sehemat penulis, konsep pemikiran politik Ibn Tamiyah mengacu pada nalar akal dan nalar nash. Dengan akal ia meletakkan kebutuhan manusia bekerja sama satu sama lain, terorganisi, dan membutuhkan kepemimpinan tanpa peduli apakah orang seorang muslim atau bahkan tanpa agama sekalipun. Sementara, nalar nash Ibn Taimiyah mengacu pada banyaknya hadist yang membicarakan pentingnya kepemimpinan dan pemerintahan. Salah satu sabda nabi: *“Bila ada orang melakukan perjalanan, maka salah satu diantara mereka menjadi pemimpin”* dan juga *“Enam puluh tahun berada di bawah pemerintahan tirani lebih baik dari pada satu malam tanpa pemerintahan”*.²⁸ Dengan nalar hadist tersebut maka Ibn Taimiyah beranggapan akan sangat pentingnya pemerintahan dalam menjalankan fungsinya menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, memasyarakatkan tauhid dan mempersiapkan munculnya sebuah negara yang mengabdikan kepada Allah.²⁹

Berikutnya muncul pertanyaan, apakah perlu umat Islam mengikatkan diri pada kekuasaan politik negara Islam yang tunggal? Ibn Taimiyah menjawab

²⁷ Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam*, hlm. 47.

²⁸ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 174.

²⁹ *Ibid.*

“tidak”. Ia menolak konsep negara Islam universal tunggal, dan prinsip kekhalifahan yang dianut oleh masa sebelumnya. Ibn Taimiyah malah justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan iman, kendatipun berdiri beberapa negara Islam.³⁰

Maka yang dikatakan negara Islam menurut Ibn Taimiyah adalah tidak harus secara *defacto* berdiri negara dengan atribut Islam, melainkan sebuah negara yang tunduk pada kerangka kerja konstitusi umum yang tertuang dalam Quran dan Hadits.³¹

Ibnu Taimiyah memberikan saran supaya tata politik ditegakkan demi menopang Syari’ah dan meraih maksud inti Syari’ah atau hukum. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa agama tidak bisa direalisasikan tanpa negara. Ibnu Taimiyah mengatakan kepemimpinan Muhammad SAW tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah negara, dia juga tidak ingin membahas asal sebuah negara.³²

3. Teori tentang Kepemimpinan

Pemerintahan dalam Islam memiliki peranan krusial dalam menggapai tujuan syari’at. Kualitas utama pemerintahan bukan keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu, seperti khilafah, tetapi kemampuannya melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip syariat. Jadi tidaklah tepat kalau pemerintahan dalam Islam mengadopsi sistem monarki, aristokrasi atau demokrasi. Ibn Taimiyah menghendaki yang orisinal yaitu pemerintahan yang menitikberatkan pada asas konstitusi, koperasi dan hubungan perjanjian melalui

³⁰ *Ibid.*

³¹ Senada dengan istilah negara nomokrasi.

³² Qomarudin Kan, *Mawardi Theori of the State*, Terjemah Imran Rosidi, “*Telaah Kritis Teori Mawardi Tentang Negara*”, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000), halaman. 308.

kontrak sosial. Karena itu Ibn Taimiyah tidak menganut paham nepotisme, malah justru setiap pejabat negara yang ditunjuk haruslah seobjektif mungkin memiliki kualitas dan kemampuan diri.³³

Ibnu Taimiyah menegaskan negara adalah wasilah dalam mewujudkan perintah Tuhan, Ibnu Taimiyah mengatakan kesejahteraan tidak akan terwujud kecuali dengan bermasyarakat dan bernegara, oleh karenanya setiap kehidupan manusia membutuhkan negara demi menjalankan kewajiban agama serta sebagai tujuan untuk mensejahterakan.³⁴

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemikiran politik Ibnu Taimiyah menawarkan realisme sebagai wahana serta fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh teori-teori tradisional, sehingga pemikiran Ibnu Taimiyah sangat mungkin untuk di kaji sebagai bahan perubahan kehidupan dan politik bernegara.

4. Mencoba Kontekstualisasi

Melihat Indonesia raya yang proses pemilihan pemimpin dengan demokrasi, tentu dibutuhkan karakter pemimpin yang memiliki pandangan politik yang sempit dan pragmatis, akan tetapi pemimpin yang mampu membaca konteks kemasyarakatan dengan melibatkan semua pihak dalam menentukan dan menjalankan kebijakan yang dihasilkan, sebab tanpa ada upaya yang untuk

³³ Mengacu pada surat Al-Qashash ayat ke 26, bahwa pejabat negara haruslah *al-Qawiy al-amin* dan berkeadilan. *Ibid.*, hlm.20-22. Lihat pula Jeje Abdul Rohman, *Politik Kenegaraan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 139. Kuat di sini diartikan memiliki kompetensi. Adil adalah memiliki kesesuaian dengan al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan Amanah diartikan takut kepada Allah.

³⁴ Mufid, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), halaman. 43.

melihat masyarakat, kebijakan itu akan fungsi untuk kalangan elit dan merugikan bagi kalangan menengah.

Penting kemudian ada sosok yang diimpikan Ibnu Taimiyah kepemimpinan yang melibatkan kontrak sosial, sebab negara merupakan wasilah atau perantara bagi seorang pemimpin, oleh karena itu, moment merakayakan kemerdekaan pun sebenarnya harus ada control dari pemimpin, bagaimana merayakan hari kemerdekaan bangsa khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagi manusia yang memahami sejarah berdirinya Indonesia, sebuah bangsa yang didirikan dari perjuangan darah, tenaga dan moral, kemudian merdeka dengan fondasinya adalah Pancasila (*ambil cepat*), orang akan paham makna Pancasila sebagai dasar Negara, filsafat negara, dan sebagai ideologi bangsa yang sudah final, yang tidak bisa dirubah-rubah atau di otak-atik oleh ideologi baru.

Kemerdekaan yang ke-77 tahun ini, selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu semarak lomba, gerak jalan, dan sederet keramaian lain yang dianggap meramaikan hari kemerdekaan Republik Indonesia artinya perayaan kemerdekaan di isi oleh pertunjukan dan perlombaan.

Semarak kemerdekaan yang diisi pertunjukan dan perlombaan tanpa mempertimbangkan spirit nilai substansial dari kemerdekaan itu akan menghilangkan bahkan “membunuh” nilai-nilai kesejarahan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa di dalam kemerdekaan

itu ada pertumpahan perjuangan, pertumpahan nyawa dan raga bahkan jiwa akan sirna oleh keramaian lomba tanpa refleksi kesejarahan.

Refleksi kesejarahan dalam moment kemerdekaan Indonesia sebuah keniscayaan, sebab tanpa ada upaya kearah refleksifitas kesejarahan kemerdekaan Indonesia akan sia-sia dirayakan tanpa makna apa-apa bagi generasinya. Generasi kita hanya akan tahu bahwa kemerdekaan hanya berisi lomba, liburan sekolah dan upacara kemerdekaan. Selebihnya tidak ada.

Kemerdekaan itu sebuah harapan besar bagi kemerdekaan Indonesia, bukan ratapan apalagi komedian. Harapan itu merupakan sebuah spirit nilai-nilai yang terkandung dikedalaman kemerdekaan, oleh karenanya perayaan kemerdekaan itu penting kemudian ada sisi refleksifitas kesejarahan sebagai bagian dari proses kemerdekaan yang tidak muda didapatkan dari penjajah.

Kalau kita tanyakan, apa hubungan lomba makan krupuk, lomba lari karung, lomba seragam baju terhadap kemerdekaan? Tentu hanya hiburan, kalau di cari alasannya kebersamaan dan kekompakan. Lalu kebersamaan dan kekompakan dalam hal apa dan untuk siapa?

Pancasila sebagai payung besar bagi nilai-nilai universal yang tersimpan dikedalaman Pancasila sama sekali tidak akan terkuak bila kemerdekaan dimaknai sebagai sebuah comedian sesaat, lalu What's nex? Padahal perayaan kemerdekaan yang ke-77 itu gambaran kita nanti. Padahal kalau kita refleksikan ternyata kita masih terjajah. Terjajah oleh teknologi, terjajah oleh gaya hidup, terjajah oleh kroposnya mental pemimpin. Pikiran kita terjajah, identitas sosial pun terjajah. Tiadanya panutan moral, karakter, dan pola pikir. Apalagi muncul pancasila

bersyari'ah, padahal Pancasila tanpa embel-embil syari'ah lebih bersyariah daripada Pancasila bersyari'ah. Ada-ada saja orang.

Lalu mengapa generasi ini yang memiliki “integritas” memadai justru muda tergoyahkan? Padahal kita dijajah 350 tahun, secara logika tidak mungkin Kemerdekaan itu bisa kita gapai. Tapi dengan spirit religiusitas dan nasionalitas yang dimiliki Soekarno pelan-pelan kemerdekaan bisa kita raih. Artinya kemerdekaan ini tidak diambil secara gratis, akan tetapi dibutuhkan spirit strategi dan metode dari Soekarno agar Indonesia harus merdeka. Yang diumumkan pada pukul 10 WIB, tanggal 10 Ramadhan dengan perintah dari K.H Hasyim Asy'ari maka kemerdekaan itu diumumkan.

Lalu pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersepakat bahwa fondasi dan ideologinya adalah Pancasila. Oleh karena itu penting kemudian membaca Pancasila tidak lepas dari nilai-nilai universal dari sebuah kemerdekaan yang sebenarnya mengandung nilai perjuangan yang tidak mudah didapatkan. Lalu seremonialitas pertunjukan dan perlombaan itu harus direfleksikan sebagai sebuah jawaban bagi kemerdekaan, jika tidak ada hubungan yang substansial dengan kemerdekaan lebih baik dana pertunjukan dan perlombaan diberikan kepada fakir yang dimiskinkan system pemerintahan yang korup.

Pancasila sudah saatnya dikembalikan pada sebuah kekuatan pikiran, dan jiwa manusia Indonesia untuk terus menjaga dan mengawal kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab kemerdekaan itu hak segala bangsa. Artinya jika ada manusia Indonesia secara materi masih jauh dari layak jangan katakana Indonesia

merdeka. Pancasila sudah saatnya menjadi kekuatan mental dan pikiran Indonesia. Itulah moment yang harus dilakukan di tengah semarak pertunjukan dan perlombaan, sehingga Pancasila melahirkan integrasi bangsa, sosial, keilmuan, budaya dan integrasi pelestarian lingkungan.

Dari itulah, penting bagi manusia yang dimerdekaan dari hasil jerih kemerdekaan ini untuk terus belajar dan membaca untuk menghadirkan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang berkualitas. Dari pendidikan yang berkualitas itulah pembangunan mental-mental kebangsaan itu hidup di kedalaman jiwa bangsa dan negara. Maka dari sini pulalah keseimbangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan tercapai. Tidak lagi pembisnis illegal, perusahaan illegal, dan koruptor. Sebab kalau tidak kemerdekaan itu akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki daya pandang pendek, literasinya pun akan buruk, asal viral, asal jiplak, itulah problem kepancasilaan yang serius sebenarnya. Lalu apa implikasi bila manusia seperti itu? (Matroni Muserang, *Radar Madura*, 21 Agustus 2022).

Dengan demikian, harus dimulai dari literasi yang baik, anak-anak diberi simulasi di ruang kelas agar kenal dengan pahlawan Indonesia. Di tingkat PAUD, TK, dan SD/MI kita beri foto satu persatu pahlawan lalu dijelaskan satu persatu, anehnya gurunya pun tidak paham sejarah pahlawan Indonesia, karena tingkat literasinya dikalangan guru pun sangat amat minim.hahaha. Apakah masih akan dikatakan pelajar Indonesia bila literasinya masih buruk? Semoga nilai-nilai universal Pancasila menyertai kita dalam menjalankan kehidupan, agar kita lebih tangguh, lebih inklusif-transformatif-kritis dan lebih mencerdaskan.

5. Darurat Keteladanan Pemimpin

Masyarakat kini ada dipusaran keterbukaan, sehingga masyarakat pelosok pun dengan muda mengakses informasi tanpa batas. Dengan tanpa batas kita mengakses, tanpa batas pula daya konsumsi informasi menjadi asupan harian. Akhirnya asupan itu sebuah keniscayaan. Akibatnya ada yang lupa makan, lupa mengerjakan Pekerjaan Rumah, bahkan lupa shalat dan keterlupa-keterlupa yang lain.

Ini benih awal “kematian” itu, kita tidak lagi peduli akan hal-hal yang sifatnya immateri, karena di kepong materi yang menjanjikan dan diagungkan bahkan dituhankan. Oleh karena itu, siapa yang bertanggungjawab atas hal ini, tentu ini masalah bersama, kalau lebih khusus tentu kita membutuhkan sosok yang mampu memberikan *uswah* (keteladanan) bagi masyarakat, kalau di pondok keteladanan bagi santri, kalau di sekolah keteladanan bagi siswa, kalau perguruan tinggi keteladanan bagi mahasiswa.

Kalau kita cek, akhir-akhir justru kita dikagetkan dengan perlakuan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi pun di jawab Barat yang menghamili santrinya, belum lagi mafia-mafia, hal itu menjadi bukti nyata bahwa kini kita berada di tengah darurat keteladanan di berbagai hal.

Padahal kalau kita belajar pada Nabi Muhammad SAW (bagi yang mau), keberhasilan Nabi Agung dalam mengislamkan itu dikarenakan “keteladanan”, lalu bagaimana konteks hari ini keteladanan itu mampu menjadi keseharian kiai, guru, dosen dan pengusaha? Tentu keteladanan dalam konteks kemanusiaan, bukan konteks keagamaan, saya kira keteladanan Nabi Agung kita bukan sekadar

keteladanan dalam konteks keagamaan, akan tetapi dalam konteks kenegaraan, dimana waktu itu pemimpin negara adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika Islam hanya ibadah dan muamalah, niscaya Rasulullah SAW tidak akan pernah di angkat pemimpin dan tidak akan maju di medan perang.

Sebagai warga negara (yang mengakui NKRI Harga Mati) tentu kita menjadi teladan menjadi warga negara dan menjadi pemangku negara dalam setiap aktivitas sosialnya dengan baik. Meskipun hal ini “masih jauh dari harapan”, sebab dewasa ini di desa (tidak semua desa) untuk memilih kandidat kepala desa sudah “harus” memberi bekal (uang untuk nyoblos) harga suara pun macam-macam, tanpa saya sebut berapa.

Kalau hal ini menjadi “tradisi” setiap pemilihan, kita tinggal menunggu kematian moral, etika, ahlaq bahkan kematian Tuhan, mengapa tidak? Ketika perintah Tuhan hanya diketahui tanpa ada ijtihad untuk melaksanakan, diperintah taat pada negara atau pemimpin (*ulil amri*), justru korupsi dan menjadi pengusaha ilegal. Kalau tradisi ini terus-menerus ditradisikan dengan dalih “akadnya” sah, maka kematian keteladanan menunggu kita semua. Jadi saya merasa betul apa yang dikatakan filosof Nietzsche bahwa Tuhan Telah Mati, siapa pembunuhnya? Tentu kita sendiri, ko’ bisa? Di saat perintah Tuhan tidak lagi menjadi pertimbangan dan tidak lagi penting, yang penting “aku kaya” meskipun hasil dari suap, uang dari usaha illegal. Lalu dimana makna keteladanan bila karakternya adalah “aku”.

Kharisma seorang pemimpin, guru, dosen bahkan kiai pun akan dikebumikan bersamaan dengan dibumikannya keteladanan. Sebab bintang-

bintang pengetahuan, bulan ilmu, matahari tauhid tidak akan hidup dikedalaman batin manusia padahal itu adalah hati dan relung batin manusia kata Ibnu Atha'illah as-Sakandari, dalam hikam, kitab pertama di nomor 153).

Mereka hanya mampu *Kasyaf shuwari* (pengungkapan bentuk), tanpa mampu *kasyaf maknawi* (pengungkapan immateri), inilah yang disebut sebagai zaman manusia hanya tahu pada bentuk tanpa tahu isi, hanya tahu baca tanpa tahu arti. Hanya tahu cahaya tanpa tahu daripada lahirnya sebuah cahaya. Belum lagi ke-aku-an identitas sosial yang melekat pada diri seorang, yang merasa dirinya keturunan “darah biru”.

Betul memang, kita hari ini berkecimpung dengan bentuk-bentuk (“*lipstick*”) tanpa peduli dibalik bentuk. Mengapa tidak? Di satu sisi kita dituntut untuk sekolah dan kuliah agar wawasan kita tidak sempit, tapi disisi yang lain kadang kita meninggalkan sisi pendidikan moral, padahal moral ini seharusnya menjadi sajadah ilmu pengetahuan, artinya ilmu pengetahuan tidak memiliki makna apa-apa tanpa adanya moral. Tentu antara moral dan ilmu pengetahuan harus selalu bergandeng tangan menuju suatu tujuan.

Etika dan tata nilai bisa menjadi pedoman berkehidupan dalam negara. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa agama tidak bisa direalisasikan tanpa negara dan Penegakan pemerintahan merupakan perintah agama.

Kita sudah sampai di ruang pendidikan yang tidak lagi hitam-putih paradigmanya, akan tetapi pendidikan kita sudah sampai di kampung yang membutuhkan sinergitas. Misalnya pendidikan matematika sudah saatnya bersinergi dengan moral atau mental, sebab kalau tidak ada sinergi atau integritas

maka pendidikan yang kita miliki hanya akan menjadi biang dan akan menciptakan karakter-karakter pragmatis-materialis-egois. Karakter ini akan mendiami manusia selagi manusia ini belum mendapatkan hidayah (*Matroni Muserang: Pendidikan yang Tak Mendidik, Radar Madura, 15/11/2021*).

Di sini pentingnya ada interkoneksi keilmuan, sebab kalau kita menggunakan fikih sentris (sebagai contoh), menjual rokok illegal pun sah menurut fikih, tapi di sana ada unsur (*uswah*) keteladanan, menjadi tidak baik secara etika, jika seorang tokoh atau pemimpin memiliki perusahaan illegal, bagaimana masyarakat nantinya, nanti kan meniru bahkan akan lebih parah, kayak pepatah, *jika guru kencing berdiri, siswa kencing lari*. Berarti menjual narkoba juga sah dan menjual wanita pun sah, jika menggunakan akad jual beli, kita tahu bahwa agar hukum jual beli sah adanya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi dengan sadar, menyadari dan ridha.

Dengan demikian, kita sebagai figur tentu harus berpikir ulang jika mau membangun bisnis illegal. Bagi saya urusan bisnis ini pribadi, tapi jika seorang figur yang memiliki hal itu, kita menunggu waktu berapa banyak akan lahir pebisnis yang lahir dan lebih parah dari yang dilakukan tokoh tersebut. Semoga mereka paham apa akan pemikiran agama (bukan agama).

6. Menirukan Kepemimpinan Ala Indonesia

Saya mencoba memberikan contoh kepemimpinan yang di cita-cita Ibnu Taimiyah salah satunya adalah K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memang masih tergiang di khalayak umum masyarakat Indonesia sampai saat ini. Seolah-olah Gus Dur masih hidup sampai sekarang. Dalam konteks kekinian memang

kita membutuhkan spirit Gus Dur baik di ranah politik, budaya, lebih-lebih di ranah keagamaan dan keberagaman.

Mengingat berbagai problem sosial-kemanusiaan yang terus memoles wajah bangsa dari jeratan luka pembunuhan, kemiskinan, pelecehan, korupsi, ketidakadilan, dan kekerasan atas nama agama dan pemikiran. Spirit apa yang kemudian bisa kita hisap dari Gus Dur dalam menyuburkan inklusifitas sosial-kemanusiaan.

Sebenarnya spirit politik Gus Dur lahir dari sosok figur K.H Hasyim Asy'Arie yang sejak dulu memperjuangkan rakyat. Spirit itulah yang mengalir terhadap Gus Dur sehingga perjuangan untuk rakyat tetap dilanjutkan Gus Dur melalui jembatan politik salah satunya.

Bagi Gus Dur politik bukan dimaknai sebagai ajang bisnis mencari duit dan kursi kekuasaan, bukan dijadikan bisnis jangka panjang, akan tetapi kursi kekuasaan dijadikan alat untuk memperbaiki keadaan keluarga sendiri. Gus Dur lebih substansial memaknai dan menjalankan spirit kebangsaan. Bangsa dilihat dan dimaknai sebagai sebuah alat untuk masuk ke ranah politik, karena sulit bagi kita untuk menjadi tokoh politik Indonesia tanpa melalui jalur partai, jadi PKB bukanlah bagian mutlak dari perjalanan politik Gus Dur selama menjadi presiden, akan tetapi bagian dari cara Gus Dur dalam membaca politik global.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ada spirit itu hari ini? Spirit yang diwariskan Gus Dur terhadap para generasi bangsa? Pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan bersama, agar bangsa dan Spirit Gus Dur tidak menjadi hampa di mata pemuda bangsa ke depan.

Karena kalau mau masuk dunia politik maka kita harus memiliki partai, walau pun prosedur ini sangat formal, sebenarnya untuk menjadi pemimpin tidak harus lewat partai, tapi apa mau di kata, ketika Indonesia sudah demikian. Jadi bagaimana memperbaiki partai itu dengan memasukkan spirit K.H. Hasyim Asy'arie dan Gus Dur dan tokoh NU yang sejak dulu memperjuangkan habis-habis untuk rakyat. Pertanyaanya apakah kita mampu?

Kalau kita mau belajar dan mau untuk berpikir, spirit itu pasti di dapat dan bisa dijadikan dasar pemikiran dalam menjalankan roda spirit kebangsaan, karena kalau ingin mendapatkan spirit kebangsaan yang pernah diperjuangkan gus Dur maka dari spirit itulah kita memberikan ide segar dan formula yang kontekstual dalam menata rakyat dan bangsa yang sudah semraut ini.

Maka cara yang baik adalah melanjutkan ide atau pemikiran, spirit kebangsaan yang pernah dilakukan Gus Dur, walau pun tidak menutup kemungkinan adanya formula baru atau pemikiran baru untuk dimasukkan ke ruang pemikiran pemerintahan demi tercapainya cita-cita bangsa yang damai, makmur, sentosa. Bukan waktunya kita mengedepankan duit, terlalu sakit rakyat Indonesia, karena adanya ketidakadilan, koruptor, kasus para pemimpin Indonesia, dan seks komersial yang terus terjadi.

Ide yang segar sangat dibutuhkan saat ini untuk menyejukkan ladang percaturan pemikiran kebangsaan Indonesia. Untuk menyadarkan para elit politik yang sejauh ini sudah jauh menyimpang dari Undang-Undang, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Maka formula untuk menyembuhkan penyakit “ambisi” kekuasaan tidak terjadi, karena kalau ini terus-menerus terjadi jangan harap

bangsa kita akan damai, makmur dan sentosa seperti yang dicita-citakan bangsa yang kaya ini.

Pancasila sebagai ideologi dilumpuhkan pelan-pelan, sebab Pancasila memiliki relasi yang kuat dan erat dengan keagamaan, politik, budaya dan ekonomi. Sehingga yang dibenturkan bukan kristen dengan Budha, akan tetapi Islam Vs Islam. Nah inilah yang sebenarnya sangat berbahaya dan ini tidak banyak para elit politik dan tokoh agama menyadari dan paham. Kasus Solo dan Sampang salah satu realitas yang diperlihatkan oleh kaum kapitalis-materialis-modern bahwa kontruksi kita dilumpuhkan pelan-pelan.

Skenario besar yang sedang dirancang untuk melumpuhkan bangsa. Padahal kita tahu kewajiban negara adalah menjaga keamanan, menjaga ketentraman, menjaga kedamaian, tapi mengapa seakan negara “mati” tak berdaya. Ini salah satu bukti nyata bahwa sendi-sendi negara sedang ada yang lumpuh. bagi siapa pun termasuk aparat penegak hukum untuk mengerti wawasan sosiologis. Kalau ini tidak diajarkan di dunia pendidikan tersebut maka tidak heran kalau kita berfikir parsial, padahal ilmu harus ada korelasi dengan ilmu-ilmu yang lain.

Karena ada indikasi negara gagal salah satunya adalah kontruksi keamanan gagal, kontruksi ekonomi dan politik gagal, dan kontruksi sosial gagal. Korporasi internasional sedang menguasai negara, akhirnya yang terjadi adalah politik transaksional. Serangan yang sifatnya “membunuh” itu merupakan dampak dari politik transaksional yang kini masih nyaris tak bisa dibentung, karena dalam politik, siapa akan dikorbankan demi satu kekuasaan. Maka toleransi keberagaman

adalah bagaimana kita langsung turun ke jalan. Sekarang yang terjadi justru memakai bendera-bendera sendiri. Kebersamaan dalam satu tujuan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat nyaris tidak ada. Yang ada bagaimana mendapat keuntungan dari masyarakat.

Akhirnya kontruksi perbudakan harus dibentengi oleh spirit kebangsaan Gus Dur dengan *pertama* oleh budaya lokal harus diperkuat, *kedua* hubungan “kekerabatan” harus dipertahankan, sekarang anak-anak muda cenderung egois. Tidak heran kalau menjadi buruh di negeri sendiri. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah orang-orang *biasa* yang mampu mengajarkan dan langsung turun lapangan (orang-orang yang mampu *mengayomi dan* mengerti masyarakat). Inilah substansi spirit kebangsaan yang diperjuangkan Gus Dur.

C. PENUTUP

Dengan demikian maka, teori pemikiran politik Ibn Taimiyah sangatlah modern dan berbeda dengan teori politik tradisional yang menitik beratkan pada fungsi khilafah. Modernitas pemikiran Ibn Taimiyah terletak pada, *pertama*, teorinya memiliki kedekatan dengan pemerintahan modern, misalnya manusia senantiasa membutuhkan pemerintahan didasarkan pada hukum alam dan keterlibatan manusia itu sendiri. Tampaknya Ibn Taimiyah bermaksud menawarkan analisis sosiologis berdasarkan hakikat manusia yang bebas dari penetrasi agama. *Kedua*, ia menghargai peranan kekuasaan politik, sebagai syarat mendirikan pemerintahan. Ibn Taimiyah berbeda dari teori sebelumnya yang berbicara mengenai syarat-syarat pemimpin negara, akan tetapi Ibn Taimiyah malah justru menganjurkan umat Islam untuk mengikuti yang tidak adil, licik jika

keadaan terdesak dan satu-satunya figur yang mampu mempertahankan integritas, solidaritas, stabilitas politik dan keamanan masyarakat.³⁵

Teori Ibnu Taimiyah tentang keberadaan negara dengan segala hal yang melengkapinya, maka terlihat jelas bahwa ia memadukan sistem doktrinal ajaran Islam dengan nilai sosiologis kehidupan umat manusia. Argumen doktrinal yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah adalah bahwa kebaikan perlu untuk dilaksanakan, dan pelaksanaannya membutuhkan seorang pemimpin. Sedangkan argumen sosiologis yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah bahwa manusia membutuhkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu bisa dicapai dalam suatu organisasi masyarakat yang mempunyai pemimpin.³⁶

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iah*, Cairo: Dar al-Sya'b, 1980.
- _____, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah*, Riyad: Maktabah Riyad, 1963.
- _____, *Minhaj as-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-'Urbah, 1962.
- Abdul Mu'in, *Fiqih Siyāsah sebuah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
- Anton Beker, Haris Zuber, *Metodologi Penelitian Falsafat*, (yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Bambang Sunggono, *Metadologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), cet. Ke-III.
- Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011).
- Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*, (Malang: Setara press, 2009).
- Ignaz Colodzih, *The Zahiris*, (alih bahasa Wolfgang), (Leiden: E. J. Brill, 1971).
- Jeje Abdul Rohman, *Politik Kenegaraan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

³⁵ *Majmu' Fatawa*, jilid 28, hlm. 66-68.

³⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah...*, op.cit., hlm. 137.

- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan*, (alih bahasa Masrohin), Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2007).
- M. Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada, 1990).
- Matroni Muserang, *Kemerdekaan: Antara Tragedi dan Komedi*, (Radar Madura, 21 Agustus 2022).
- Matroni Muserang: *Pendidikan yang Tak Mendidik*, Radar Madura, (15, Nopember, 2021).
- Mufid, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah* (diterjemahkan oleh Anas Mahyudin), Islamabad: Islamic Research Institute, 1973.
- Qomarudin Kan, *Mawardi Theori of the State*, Terjemah Imran Rosidi, “*Telaah Kritis Teori Mawardi Tentang Negara*”, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000).